

**KONFLIK SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA BATU MILA
DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV DI KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG**



**HENDRA TRIAWAN SUDARYO PUTRA
E031181504**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

202

**KONFLIK SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA BATU MILA
DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV DI KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG**

**HENDRA TRIAWAN SUDARYO PUTRA
E031181504**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**KONFLIK SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA BATU MILA
DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV DI KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG**

HENDRA TRIAWAN SUDARYO PUTRA
E031181504

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Sosiologi

pada

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

KONFLIK SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA BATU MILA
DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV DI KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG

HENDRA TRIAWAN SUDARYO PUTRA

E031181504

Skripsi,

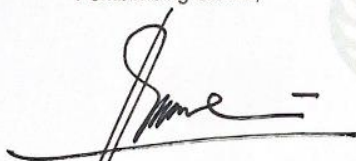
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sosiologi pada 19 Agustus 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Sosiologi
Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Dr. M. Ramli, AT. M.Si
NIP. 19660701199903002

Pembimbing Pendamping,



Ridwan Syam, S.Sos., M.Si
NIP. 198506122020121004

Mengetahui:
Ketua Departemen Sosiologi



Dr. M. Ramli, AT. M.Si
NIP. 19660701199903002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Konflik Sengketa lahan Antara Masyarakat Desa Batu Mila Dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Ramli, AT. M.Si dan Ridwan Syam S.Sos., M.Si). karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut atau aturan yang berlaku.

Dengan ini saya menyampaikan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2024



Hendra Triawan Sudaryo Putra
Hendra Triawan Sudaryo Putra
E031181504

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul yang penulis ajukan "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Batu Mila Dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang". Penyusunan skripsi yang penulis lakukan telah disadarinya bahwa sebagai penulis awam yang baru saja menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan seperti demikian adanya ini pastilah akan masih sangat jauh dari kata sempurna.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengorbankan begitu banyak hal dalam membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati serta doa yang tidak ada henti kepada anaknya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ramli, AT. M.Si dan Pak Ridwan Syam S.Sos., M.Si, selaku penasehat pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu, memberih arahan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih penulis juga persembahkan kepada tim penguji Bapak Dr. Sawedi Muhammad, M.Sc dan Pak Hariashari Rahim, S.Sos., M.Si atas segala masukan, kritikan dan saran sebagai bahan evaluasi bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini. selebihnya terimah kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemasiswaan penulis. Akhir kata, penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terimah kasih.

Penulis

Hendra Triawan Sudaryo Putra

ABSTRAK

Hendra Triawan Sudaryo Putra, E031181504 “Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Batu Mila Dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Skripsi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dibimbing oleh M. Ramli, AT dan Ridwan Syam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab konflik, bentuk konflik dengan menggunakan analisis tahapan konflik serta klasifikasi konflik yang terjadi, dan upaya penyelesaian dengan menggunakan pola penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Batu Mila dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung atau melakukan wawancara menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 340 kepala keluarga. Metode pengambilan sampel memakai rumus *simple random sampling* (sampel acak sederhana), dengan hasil sampel 77 orang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Penelitian ini memberikan gambaran situasi konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Batu Mila dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Permasalahan yang terjadi akibat masa Hgu PT. Perkebunan Nusantara XIV yang habis dan tidak mendapatkan perpanjangan Hgu dari BPN pusat menjadikan Masyarakat masuk untuk mengelola lahan tersebut. Dimasa berakhirnya Hgu perusahaan tersebut menjadi masa transisi dan ketidakjelasan status lahan yang mengakibatkan konflik antara masyarakat Desa Batu Mila dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV. Peran pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan ketidakjelasan status lahan tersebut guna untuk menghindari adanya konflik sengketa lahan yang terjadi saat ini. Penelitian ini berkontribusi terhadap masalah masalah terkait konflik agraria yang sering terjadi di lahan perkebunan skala besar.

Kata Kunci: *Konflik, Sengketa Lahan, Alih fungsi lahan.*

ABSTRACT

Hendra Triawan Sudaryo Putra, E031181504 "Land Dispute Conflict between Batu Mila Village Community and PT. Perkebunan Nusantara XIV in Maiwa District, Enrekang Regency". Thesis Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Supervised by M. Ramli, AT and Ridwan Syam.

This research aims to find out what factors cause conflict, the forms of conflict using analysis of conflict stages and classification of conflicts that occur, and efforts to resolve them using conflict resolution patterns that occur between the people of Batu Mila Village and PT. Perkebunan Nusantara XIV. This research uses descriptive quantitative methods. The collection technique is carried out by distributing questionnaires directly or conducting interviews using questionnaires. The population in this study was 340 heads of families. The sampling method uses a simple random sampling formula, with a sample of 77 people. The data obtained was analyzed using descriptive quantitative analysis techniques, aiming to provide an overview of the data collected in the research with the help of SPSS software.

This research provides an overview of the conflict situation that occurred between the people of Batu Mila Village and PT. Nusantara XIV Plantation in Maiwa District, Enrekang Regency. Problems that occurred due to the Hgu period of PT. The Nusantara The period when the company's Hgu expired became a transition period and land status was unclear, which resulted in conflict between the people of Batu Mila Village and PT. Perkebunan Nusantara XIV. The government's role should be to resolve the unclear land status in order to avoid the current land disputes. This research contributes to problems related to agrarian conflicts that often occur on large-scale plantations

Keywords: Conflict, Land Dispute, Land conversion.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGANTAR..... | |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| <i>ABSTRACT</i> | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 4 |
| 1.5 Konflik Agraria..... | 5 |
| 1.6 Tahapan dan Klasifikasi Konflik..... | 7 |
| 1.7 Penyelesaian Konflik | 8 |
| 1.8 Teori Konflik | 9 |
| 1.9 Penelitian Terdahulu | 11 |
| 1.10 Kerangka Fikir | 12 |
| 1.11 Defenisi Operasional..... | 155 |
| BAB II METODE PENELITIAN..... | 166 |
| 2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian | 166 |
| 2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian | 166 |
| 2.3 Populasi dan Sampel | 177 |
| 2.4 Teknik Pengumpulan Data | 188 |
| 2.4.1 Data Primer | 188 |

| | |
|--|------------|
| 2.4.2 Data Sekunder | 199 |
| 2.5 Analisis Data | 199 |
| 2.6 Teknik Penyajian Data | 20 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 211 |
| 3.1 Hasil | 211 |
| 3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 211 |
| a. Sejarah Desa Batu Mila | 211 |
| b. Kondisi Geografis | 233 |
| 3.2 Hasil Penelitian..... | 299 |
| 3.2.1 Identitas Responden | 299 |
| a. Jenis Kelamin..... | 29 |
| b. Usia Responden..... | 30 |
| c. Suku Responden..... | 30 |
| d. Asal Daerah Responden | 31 |
| e. Pendidikan Responden | 31 |
| 3.2.2 Rentang Histori konflik PT. Perkebunan Nusantara XIV | 32 |
| a. PT. Perkebunan Nusantara XIV | 32 |
| b. Histori Konflik | 33 |
| 3.2.3 Faktor Penyebab Konflik di Desa Batu Mila | 36 |
| a. Tumpang Tindih Penggunaan Tanah | 37 |
| b. Faktor Kemiskinan..... | 40 |
| 3.2.4 Bentuk Tahapan dan Klasifikasi Konflik | 44 |
| 3.2.5 Upaya Penyelesaian Konflik..... | 522 |
| 3.3 Pembahasan | 544 |
| 3.3.1 Faktor Penyebab Konflik di Desa batu Mila..... | 544 |
| 3.3.2 Bentuk konflik yang terjadi di Desa Batu Mila | 566 |
| 3.3.3 Upaya Penyelesain Konflik di Desa Batu Mila..... | 588 |
| BAB IV | 61 |
| 1) Kesimpulan | 61 |
| 2) Saran | 622 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 633 |
| LAMPIRAN | 666 |

DAFTAR TABEL

| Nomor urut | Halaman |
|---|---------|
| 1. Konflik sengketa lahan | 1 |
| 2. Penelitian terdahulu | 11 |
| 3. Alur sejarah perkembangan Desa Batu Mila | 211 |
| 4. Pertumbuhan penduduk Desa Batu Mila | 244 |
| 5. Tingkat pendidikan penduduk Desa Batu Mila | 255 |
| 6. Potensi hasil pertanian penduduk Desa Batu Mila | 255 |
| 7. Potensi hasil peternakan penduduk Desa Batu Mila | 266 |
| 8. Responden berdasarkan jenis kelamin | 299 |
| 9. Responden berdasarkan kelompok usia | 30 |
| 10. Responden Berdasarkan Suku | 30 |
| 11. Responden Berdasarkan Asal Daerah | 311 |
| 12. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 322 |
| 13. Rentang histori konflik PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan masyarakat Kecamatan Maiwa | 333 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor urut | Halaman |
|--|---------|
| 1. Peta Wilayah Desa Batu Mila..... | 233 |
| 2. Persentase responden berdasarkan status kepemilikan lahan yang dikuasai oleh PT.PN XIV | 377 |
| 3. Persentase responden berdasarkan peruntukan lahan yang dikelola warga..... | 388 |
| 4. Persentase responden berdasarkan lama tinggal/menduduki lahan yang sekarang dikuasai PT. Perkebunan Nusantara XIV..... | 399 |
| 5. Persentase responden berdasarkan jawaban alasan penggusuran yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara XIV..... | 40 |
| 6. Persentase responden berdasarkan hilangnya mata pencaharian/pekerjaan akibat penggusuran lahan | 411 |
| 7. Aktivitas mata pencaharian warga setelah penggusuran yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara XIV | 422 |
| 8. bentuk ganti rugi yang diberikan PT. Perkebunan Nusantara XIV kepada warga yang terdampak..... | 433 |
| 9. Awal mula konflik berdasarkan jawaban responden pada konflik sengketa lahan di Desa Batu Mila..... | 444 |
| 10. Keterlibatan responden terkait aksi penolakan yang dilakukan warga Desa Batu Mila kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV | 466 |
| 11. Data responden terkait keseringan warga melakukan aksi penolakan kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV. | 477 |
| 12. Jawaban responden berdasarkan jumlah warga yang ditahan oleh aparat Kepolisian Kecamatan Maiwa..... | 488 |
| 13. Jawaban responden berdasarkan lama penahanan yang dilakukan pihak kepolisian kepada massa aksi penolakan PT. Perkebunan Nusantara XIV..... | 499 |
| 14. Jawaban responden berdasarkan lama durasi waktu dalam penyelesaian kericuhan yang terjadi | 50 |
| 15. Posko warga yang berjaga..... | 511 |
| 16. Klasifikasi konflik berdasarkan jawaban responden terkait dengan siapa warga Desa Batu Mila berkonflik | 522 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor urut | Halaman |
|--|---------|
| 1. Martiks pengembangan indikator kuesioner | 677 |
| 2. Kuesioner penelitian konflik sengketa lahan antara masyarakat Desa Batu Mila dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV..... | 722 |
| 3. Coding jawaban pada kuesioner..... | 799 |
| 4. Dokumentasi penelitian..... | 866 |
| 5. Surat izin permohonan melakukan penelitian dari kampus..... | 877 |
| 6. Surat keterangan peneltian dari dinas penenaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu | 888 |
| 7. Surat keterangan persetujuan izin peneltian dari kantor Desa Batu Mila | 899 |
| 8. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari kantor Desa Batu Mila | 90 |
| 9. Riwayat hidup | 91 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin majunya perkembangan zaman dan berkembangnya sifat konsumtif masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan pertanahan dimana masyarakat menganggap tanah sebagai aset yang sangat berharga dan memiliki nilai jual yang terus meningkat setiap tahunnya. Kepemilikan tanah sering kali memicu berbagai permasalahan atau sengketa, terutama yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah.

Tanah memiliki peran dan fungsi yang penting dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Pengaturan mengenai tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Sengketa pertanahan ini timbul, berawal dari adanya pengaduan atau pelaporan dari pihak (individu/badan) yang berkepentingan dimana laporan tersebut memiliki keluhan terkait permasalahan tentang tanah yang merugikan.

Permasalahan agraria merupakan isu yang sentral dan selalu menjadi pembahasan dari waktu ke waktu. Dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tentunya pembangunan dan perluasan wilayah tempat tinggal masyarakat atau wilayah yang di kelola oleh masyarakat sebagai basis modal dalam kepentingan yang berbeda. Pengelolaan pertanahan pada setiap wilayah beberapa waktu belakangan ini mengalami berbagai macam kasus pertanahan yang diakibatkan oleh belum terjaminnya kepastian hak atas tanah dan/atau hak atas pengelolaan tanah sangatlah penting. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, sejak tahun 2007 tercatat terdapat 2.810 kasus pertanahan di wilayah Indonesia. (Sukayajadi, Sarjita, & Riyadi, 2013).

Konflik yang diakibatkan oleh sengketa tanah sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat beberapa konflik sengketa lahan diantaranya:

Tabel 1. Konflik sengketa lahan

| No. | Lokasi | Deskripsi |
|------------|----------------------|---|
| 1. | Sulawesi Tengah 2022 | Konflik masyarakat dengan perusahaan tambang mengenai sengketa lahan dikarenakan banyak tambang yang tidak mempunyai izin usaha (IUP) dan tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Aksi penolakan masyarakat terhadap tambang dilakukan karena tambang menyerobot pemukiman warga sehingga warga melakukan |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| | | pemblokiran jalan ke akses pertambangan (Il, 2020). |
| 2. | Sulawesi Selatan, Makassar 2023 | Terjadi bentrokan antara dua kubu massa di jalan AP. Pettarani. Bentrokan dua kubu massa tersebut dipicu oleh adanya sengketa lahan, kedua kelompok massa tersebut masing-masing memasang papan kepemilikan lahan. Dalam kasus tersebut terdapat dua korban luka (Cipto, 2023). |
| 3. | Sulawesi Selatan, Makassar 2021 | Konflik terjadi diakibatkan karena adanya saling klaim lahan yang menyebabkan hampir atau nyaris terjadi kericuhan antara pihak-pihak yang saling mengklaim. PT. Gihon Abadi Jaya mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya setelah memenangkan gugatan dan mengalahkan Pemprov Sulsel. (Yunus, 2021). |
| 4. | Sulawesi Selatan, Enrekang 2022 | Konflik agraria yang berkepanjangan antara warga dan perusahaan negara, PTPN XIV, yang kini menanam kelapa sawit terus berlanjut. Penggusuran lahan warga yang dianggap termasuk dalam wilayah konsesi PTPN XIV di Enrekang, Sulawesi Selatan, terus berlangsung. Lahan pertanian yang telah dimiliki warga selama puluhan tahun digusur, sehingga warga kehilangan kepastian atas tanah mereka. (Rusdianto, 2022). |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan oleh dua pihak atau lebih yang saling tergantung pada objek konflik. Proses ini melibatkan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik pertanahan antara masyarakat dan pemerintah sering terjadi dalam perebutan lahan, konflik ini kemudian mengakibatkan kerugian bagi masyarakat seperti hilangnya mata pencaharian dan potensi akan hilangnya pemukiman masyarakat. Seperti yang terjadi pada konflik sengketa lahan di Kabupaten Enrekang.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Maiwa, Desa Batu Mila sejak tahun 2016, konflik bermula sejak masuknya kembali PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) untuk mengelola bekas Hak Guna Lahan (HGU), dikarenakan sebelumnya hak guna usaha dari PT.PN XIV telah habis sehingga masyarakat masuk untuk mengelola lahan tersebut menjadi lahan pertanian dan pemukiman demi meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Pada Juni 2016, pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat peringatan kepada PT. PN XIV bahwa perusahaan tersebut tidak

lagi berhak beroperasi karena Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir pada tahun 2003. Namun, pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Enrekang memberikan rekomendasi perpanjangan untuk sebagian lahan.

Konflik antara masyarakat dan PT. PN XIV masih berlangsung hingga saat ini. Dari berbagai upaya yang dilakukan belum menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Konflik ini memuncak sehingga terjadi penolakan langsung oleh masyarakat.

Aksi penolakan masyarakat terhadap PT.PN XIV telah dilakukan berulang kali. Pada tanggal 28 Juli 2022, Masyarakat melakukan aksi penolakan pengukuran lahan bekas hak guna usaha oleh PT.PN XIV, dikarenakan lahan tersebut belum ada kejelasan. Aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat berlangsung hanya beberapa jam dan kemudian dibubarkan dikarenakan terjadi bentrokan antara Masyarakat dan aparat Kepolisian yang saat itu kebetulan sedang mengawal pengukuran lahan.

Bentuk penolakan masyarakat terjadi lagi pada 8 september 2022, aksi Demonstrasi tersebut dilakukan di depan kantor Kepolisian. Kondisi tersebut semakin meluas setelah pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyetujui dan memberikan rekomendasi terkait pembaharuan atau perpanjangan HGU kepada PT.PN XIV dengan luas Wilayah \pm 3.267 hektare (ha). Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten ini memungkinkan terjadinya potensi konflik lebih meluas.

Permasalahan konflik pertanahan antara masyarakat dan PT. PTPN XIV yang berlangsung di Kabupaten Enrekang hingga saat ini belum menemui solusi yang memuaskan. Seperti yang diketahui, konflik pada dasarnya mengacu pada "pertentangan, peperangan, atau perjuangan". Namun, makna tersebut berkembang seiring dengan munculnya perbedaan pendapat yang tajam mengenai berbagai kepentingan, ide, dan faktor lainnya. Konflik berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan, dan tingkat kekerasan yang beragam.

Melihat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Enrekang antara Masyarakat dan PT.PN XIV yang berlangsung berlarut-larut hingga saat ini dan belum menemukan jalan keluar dan perlunya untuk memahami konflik tersebut lebih mendalam maka penulis mengambil judul sebagai berikut "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Batu Mila Dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang".

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab konflik antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dilakukan masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik yang dilakukan masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi faktor yang menyebabkan penolakan keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XIV setelah Kembali mengolah bekas lahan yang pernah ditempati.
2. Sebagai panduan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait topik yang sama dengan penelitian ini.
3. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk instansi pemerintah, perusahaan terkait, dan juga masyarakat.

1.5 Konflik Agraria

Menurut Setiadi dan Kolip (2011), konflik adalah fenomena sosial yang selalu ada dalam kehidupan sosial, sehingga secara alamiah konflik bersifat inheren. Ini berarti konflik akan selalu ada dalam berbagai konteks, di mana pun dan kapan pun. Mary Scannel juga menyatakan bahwa konflik adalah hal yang wajar dan alami, yang muncul karena adanya perbedaan persepsi, pandangan, tujuan, atau nilai di antara individu atau kelompok. (Zakie, 2016).

Elly dan Usman berpendapat bahwa konflik muncul dari interaksi sosial, ekonomi, dan politik, yang pada intinya dipicu oleh persaingan untuk mendapatkan sumber daya, status sosial, dan kekuasaan. Mereka menyoroti bahwa sumber daya ini sangat terbatas dan distribusinya di masyarakat tidak seimbang. (Zakie, 2016).

Budi Harsono, dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia", menegaskan bahwa konsep agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) memiliki cakupan yang luas. Menurutnya, agraria tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga mencakup air dan berbagai kekayaan alam lainnya yang ada di dalamnya (Zakie, 2016).

Zuber (2013) menjelaskan bahwa "agraria" memiliki dua interpretasi: pertama, berhubungan dengan pertanian atau lahan pertanian, dan kedua, berhubungan dengan kepemilikan tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah dan air bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2 dari pasal tersebut menyebutkan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya di wilayah Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadi milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dari pasal ini, tampak bahwa konsep agraria didefinisikan secara luas, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan tanah, baik yang berada di permukaan, di atas permukaan, maupun isinya.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa "Agraria" tidak hanya merujuk pada lahan pertanian atau perkebunan saja, tetapi juga mencakup semua elemen yang berkaitan dengan "tanah" dalam arti yang lebih luas. Hal ini mencakup kepemilikan tanah, eksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta semua kegiatan yang terkait dengan manajemen dan pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, "Agraria" memiliki makna yang lebih luas daripada hanya lahan pertanian atau perkebunan, dan menyoroti pentingnya tanah sebagai sumber daya utama dalam konteks hukum dan kebijakan agraria.

Sebagai negara yang berbasis agraris, Indonesia kerap kali dihadapkan pada konflik yang terkait dengan persengketaan lahan. Lahan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam produksi, memegang peran signifikan dalam menunjang kehidupan

manusia dan menjadi determinan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Susanto (2019) menyatakan bahwa lahan dan struktur kepemilikannya, khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan, adalah faktor utama dalam evolusi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik setiap individu di desa.

Berdasarkan penjelasan dari Gunawan Wiradi, konflik agraria dapat diartikan sebagai suatu kondisi proses, di mana terjadi interaksi antara dua individu atau lebih, atau kelompok, yang masing-masing berupaya mempertahankan kepentingannya terhadap objek yang sama. Objek tersebut meliputi lahan dan unsur-unsur terkait lainnya seperti air, tanaman, tambang, serta udara yang berada di atas lahan tersebut. Dengan demikian, konflik agraria melibatkan pertentangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di atas lahan (Pasulle, 2019).

Yuliyah Hasanah menegaskan bahwa lahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat mendasar. Kehidupan manusia dan seluruh aktivitasnya berlangsung di atas lahan, sehingga interaksi antara manusia dan lahan selalu berlangsung. Sementara itu, Zakie menyatakan bahwa lahan sebagai sumber agraria yang paling penting, adalah sumber produksi yang sangat vital. Hal ini membuat lahan menjadi sangat dicari oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menggunakannya (Rasyid, 2018).

Berdasarkan penjelasan Zakie (2016), peningkatan penggunaan lahan menjadi alasan munculnya berbagai pola dan bentuk relasi antara manusia dengan lahan. Pentingnya lahan bagi kehidupan manusia menciptakan relasi yang sangat erat antara manusia dan lahan mereka. Dalam konteks relasi ini, lahan dapat memberikan dimensi spesifik bagi individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membentuk dan mempengaruhi seluruh struktur relasi, baik antar manusia, manusia dengan masyarakat, maupun manusia dengan negara. Lebih lanjut, Zakie (2016) menjelaskan bahwa konflik pertanahan dapat dipahami sebagai konflik yang muncul akibat relasi antara individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah lahan dan segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan bumi atau di dalam perut bumi.

Menurut Scale, konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam bukan hanya disebabkan oleh benturan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan klaim pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan adat atau tradisi oleh berbagai komunitas. Sampai saat ini, berbagai komunitas tersebut masih mempertahankan tradisi pengelolaan lahan yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik secara individu maupun komunal. (Alting, 2013).

Berdasarkan penjelasan Mudjiono, sengketa dapat diartikan sebagai perbedaan dalam hal nilai, kepentingan, pandangan, dan/atau persepsi antara individu atau entitas hukum terkait status pengendalian, kepemilikan, dan/atau penggunaan suatu lahan oleh pihak

tertentu. Sengketa dapat muncul antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. (Alting, 2013).

Berdasarkan penjelasan Mudjino (Alting, 2013), beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya sengketa adalah:

- a. Ketidak lengkapan peraturan.
- b. Respons pejabat pertanahan yang kurang terhadap kebutuhan dan ketersediaan tanah.
- c. Peraturan yang tidak sesuai.
- d. Akurasi dan kelengkapan data yang kurang.
- e. Data tanah yang tersedia tidak akurat.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa tanah.
- g. Transaksi tanah yang kurang tepat.
- h. Penyelesaian sengketa oleh lembaga lain yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan.

1.6 Tahapan dan Klasifikasi Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial yang melibatkan pihak-pihak yang berusaha untuk saling merugikan, mengalahkan, atau menghapus keberadaan pihak lainnya, yang mungkin disebabkan oleh perasaan permusuhan atau kebencian. Ada banyak faktor yang dapat memicu konflik. Misalnya, perbedaan pendapat dan keyakinan individu dapat memicu konflik antar individu. Dalam situasi konflik seperti ini, terjadi benturan antara pendapat, dan setiap pihak berusaha untuk menghancurkan pihak lain (ini tidak selalu berarti secara fisik, tetapi juga bisa berarti penghancuran simbolis atau upaya untuk menghapus pandangan yang tidak disetujui oleh pihak lain).

Konflik mengalami transformasi seiring berjalannya waktu, dengan berbagai perubahan dalam aktivitas, intensitas, tingkat ketegangan, dan kekerasan yang beragam. Mengetahui tahap-tahap konflik tersebut menjadi krusial untuk menganalisis dinamika dan kejadian yang terkait dengan masing-masing tahap konflik. Analisis tahapan konflik menurut Fisher (2010), terdiri dari lima tahap:

1. Pra konflik: Ini adalah tahap di mana konflik mulai terbentuk, ditandai dengan adanya ketegangan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Konfrontasi: Pada tahap ini, ketegangan mencapai puncaknya, dan pihak-pihak yang terlibat mulai terlibat dalam konfrontasi langsung atau saling beradu argumen secara terbuka.

3. Krisis: Tahap ini ditandai dengan meningkatnya intensitas konflik. Pihak-pihak yang terlibat mungkin mulai menggunakan tindakan agresif atau bahkan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.
4. Akibat: Pada tahap ini, konflik dideklarasikan secara resmi dan menjadi jelas bagi semua pihak yang terlibat.
5. Pasca konflik: Ini adalah tahap di mana upaya dilakukan untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi, mediasi, atau tindakan lainnya untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk latar belakang terjadinya konflik, pihak yang terlibat, dan substansi konflik. Substansi konflik mencakup konflik personal dan interpersonal, konflik kepentingan (*Conflict of interest*), konflik antara realitas dan non-realitas, konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif, serta konflik yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan (Wirawan, 2010). Selain itu, berdasarkan posisi pelaku yang terlibat dalam konflik, ada dua kategori konflik yang dapat diidentifikasi (Wirawan, 2010).

1. Konflik Vertikal

Konflik vertikal diartikan sebagai perselisihan antara berbagai elemen dalam suatu komunitas yang disusun secara berjenjang, atau perselisihan antara golongan elit dan masyarakat umum. Elit dalam hal ini bisa merujuk ke aparat keamanan, pemerintahan, atau kelompok usaha. Bentuk konflik ini bisa beragam, seperti aksi pemogokan, boikot, demonstrasi, kerusuhan, tindakan anarkis, gerakan pemisahan diri terhadap pemerintah, atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

2. Konflik Horizontal

Konflik horizontal merujuk kepada perselisihan yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki posisi yang setara atau sama. Konflik jenis ini bisa muncul antara komunitas-komunitas yang beragam. Pemicu konflik horizontal biasanya terkait dengan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Bentuk konflik ini bisa berupa perseteruan antar kelompok yang berujung pada anarkisme, tawuran, dan bentrokan lainnya. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam munculnya konflik horizontal meliputi ideologi politik, faktor ekonomi, dan faktor-faktor primordial.

1.7 Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik membutuhkan berbagai pendekatan yang dianggap berkontribusi positif dalam mengatasi konflik. Hal ini penting karena esensi dari proses penyelesaian konflik adalah menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau pertikaian, sehingga kondisi dapat segera kembali stabil (T, 2017).

Menurut Nasikun dalam (Sahlan, 2015), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, diantaranya:

- a. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa tanah secara damai melalui perundingan antara pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
- b. Konsiliasi, pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu:
 - Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
 - Lembaga harus bersifat monopoli
 - Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik
 - Lembaga harus bersifat demokratis.
- c. Mediasi, Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak yang ketiga akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa tanah guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, utusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.
- d. Arbitrasi, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.

1.8 Teori Konflik

Konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “*Con*” yang berarti bersama dan “*Fligere*” yang *berate* benturan atau tabrakan. Menurut Webster (1966), istilah “conflict” di dalam Bahasa aslinya berarti suatu “perkalihan, peperangan, atau perjuangan”. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain (Pruitt, 2009).

Menurut Bernard Raho (2007) Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian (Pasulle, 2019). "Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah Lewis Coser.

Lewis Coser adalah salah satu pelopor sosiologi konflik struktural yang pemikirannya dipengaruhi George Simmel. Kontribusi Coser dalam sosiologi konflik yaitu: pertama, melihat konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain daripada perlawanan kelompok kepetingan. Kedua, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Menurut Coser, konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya.

Coser (1987) memberikan perhatian terhadap asal mula konflik sosial, Coser mempunyai pendapat yang sama dengan George Simmel dimana dalam melihat unsur dasar konflik, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang yaitu *hostile feeling*. Namun bagi Coser *hostile feeling* belum tentu menyebabkan konflik terbuka. Sehingga Coser menambahkan unsur perilaku permusuhan (*hostile behavior*). Perilaku permusuhan inilah yang menyebabkan Masyarakat dalam situasi konflik (Novri, 2009).

Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan nonrealistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret, atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik nonrealistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Konflik nonrealistik merupakan suatu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas suatu kelompok. Diantara kedua tipe ini konflik nonrealistik lah cenderung yang sulit untuk menemukan resolusi konflik, konsensus, dan perdamaian tidak mudah diperoleh. Bagi Coser bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus, sehingga menghasilkan situasi konflik yang lebih kompleks (Novri, 2009).

Meskipun Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang positif, ia tetap mengakui bahwa konflik tetap membahayakan persatuan. Untuk mencegah atau menjadi jalan keluar dari permusuhan antara pihak-pihak yang berkonflik, Coser menawarkan konsep yang disebut sebagai "katup penyelamat (*Safety Value*)". Katup penyelamat (*Safety Value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat diterapkan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Coser, lewat katup penyelamat (*Safety Value*) itu permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan objek aslinya (Novri, 2009).

1.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian terdahulu

| No | Penulis dan Tahun | Judul | Metode Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahmi Situmorang, Amiruddin Ketaren (2021) | Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV Dan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun | Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif |
| Hasil Penelitian | | | |
| <p>Pada hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan PTPN IV adalah karena tidak ditaati nya surat resolusi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Simalungun tanggal September 1969 No:/DPRGR/65/60 tentang pengembalian tanah cadangan perkampungan Hutan Bagasan Kecamatan Siantar. 2) faktor penyebab konflik antara masyarakat desa dengan pihak PTPN IV bahwa pihak perkebunan mengklaim mereka masih punya Hak Guna Usah atas tanah tersebut hingga 2031 sedangkan masyarakat Desa Silampuyang yang menyatakan bahwa PTPN IV tersebut telah menempati dengan mengelola tanah mereka dengan tanpa izin masyarakat (Situmorang, 2021).</p> | | | |
| 2 | Muhammad Iqbal Rasyid (2018) | Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Corporate (Kasus penguasaan lahan oleh PT. Sindoka di desa Teromo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur) | Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. |
| Hasil Penelitian | | | |
| <p>Hasil penelitian ini menjelaskan Konflik agraria yang terjadi di Desa Teromu yang kemudian mengalami pemekaran menjadi beberapa desa yaitu Desa Kasintuwu, Desa Karoncia, dan Desa Non Blok, terjadi sejak tahun 1998 ketika PT. Sindoka tidak dapat lagi menyuplai bahan baku dari Sulawesi Tengah akibat terjadinya kerusakan Poso dan kemudian mengalami kebangkrutan yang berujung terlantarnya areal HGU mereka sehingga masyarakat masuk mengelola lahan tersebut (Rasyid, 2018).</p> | | | |
| 3 | Ismar hamid, Dwia A. Tina & Syaifullah Cangara (2015) | Konflik Agraria Dan Jalan Keluarnya Konflik PTPN XIV Dengan Masyarakat Polongbangkeng-Takalar Dan Keera-Wajo | Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. |
| Hasil Penelitian | | | |
| <p>Pada hasil penelitian ini menerangkan bahwa konflik agraria yang terjadi disebabkan oleh sistem produksi PTPN XIV yang mensyaratkan praktek monopoli atas tanah, yang berakibat pada terjadinya konflik berkepanjangan karena adanya perlawanan dari petani. pertentangan antara PTPN XIV dengan petani yang merupakan kelas buruh tani dan tani miskin. Dalam hal ini PTPN XIV menguasai tanah untuk kepentingan produksi bahan baku industri, sedangkan petani memperjuangkan hak atas tanah untuk kepentingan perbaikan taraf hidupnya (Hamid, Tina, & Cangara, 2015)</p> | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, Baba Barus (2020) | Ekspansi Dan Konflik Pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus Di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau | Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder. |
|---|---|---|--|

Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini, Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara informal mencakup dua tipe, yaitu: Mandiri (swadaya), hibah melalui otoritas kultural lokal oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat dengan skema ganti tumbang, dan jual beli dengan cara komunal. Ekspansi yang dilakukan secara informal mengakibatkan dampak sosial berupa konflik. konflik akibat ekspansi yang dilakukan secara informal hanya berupa konflik lahan. Konflik timbul antara masyarakat dan perusahaan mengakibatkan terjadinya gugatan hukum dan ketidakharmonisan antar-petani (Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, Baba Barus, 2020).

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 5 | Rochgiayanti (2022) | Konflik Antara Warga Desa Dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021) | Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif |
|---|---------------------|---|---|

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan konflik antara warga Desa Jambu Baru dan perkebunan kelapa sawit telah terjadi sejak masuknya perkebunan kelapa sawit pada akhir tahun 2008, isu tersebut telah memicu terjadinya penolakan pada warga. Konflik perebutan sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai konflik structural, terkait ketidaksadaran dalam kontrol, kepemilikan, dan distribusi sumber-sumber daya. alasan penolakan yang dikemukakan oleh warga Desa jambu Baru sangatlah rasional. Dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit, mereka dihadapkan kepada kedua pilihan yaitu, 1) ikut bekerja di kebun sebagai buruh perkebunan, system kerja di perkebunan sangatlah berbeda dengan system kerja tradisonal yang telah dilakukukan selama ini dan 2) tetap melakukan pekerjaan tradisonal sebagaimana telah dilakukan seacara turun-temurun Rochgiayanti (2022).

Dari beberapa referensi penelitian terdahulu yang peneliti gunakan memiliki perbedaan pada penggunaan metode penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif sehingga pada penyajian hasil penelitian akan berbeda. Kemudian peneliti akan membahas bagaimana faktor-faktor penyebab konflik, bentuk konflik dan upaya penyelesaian konflik serta membahas konflik sengketa lahan yang terjadi.

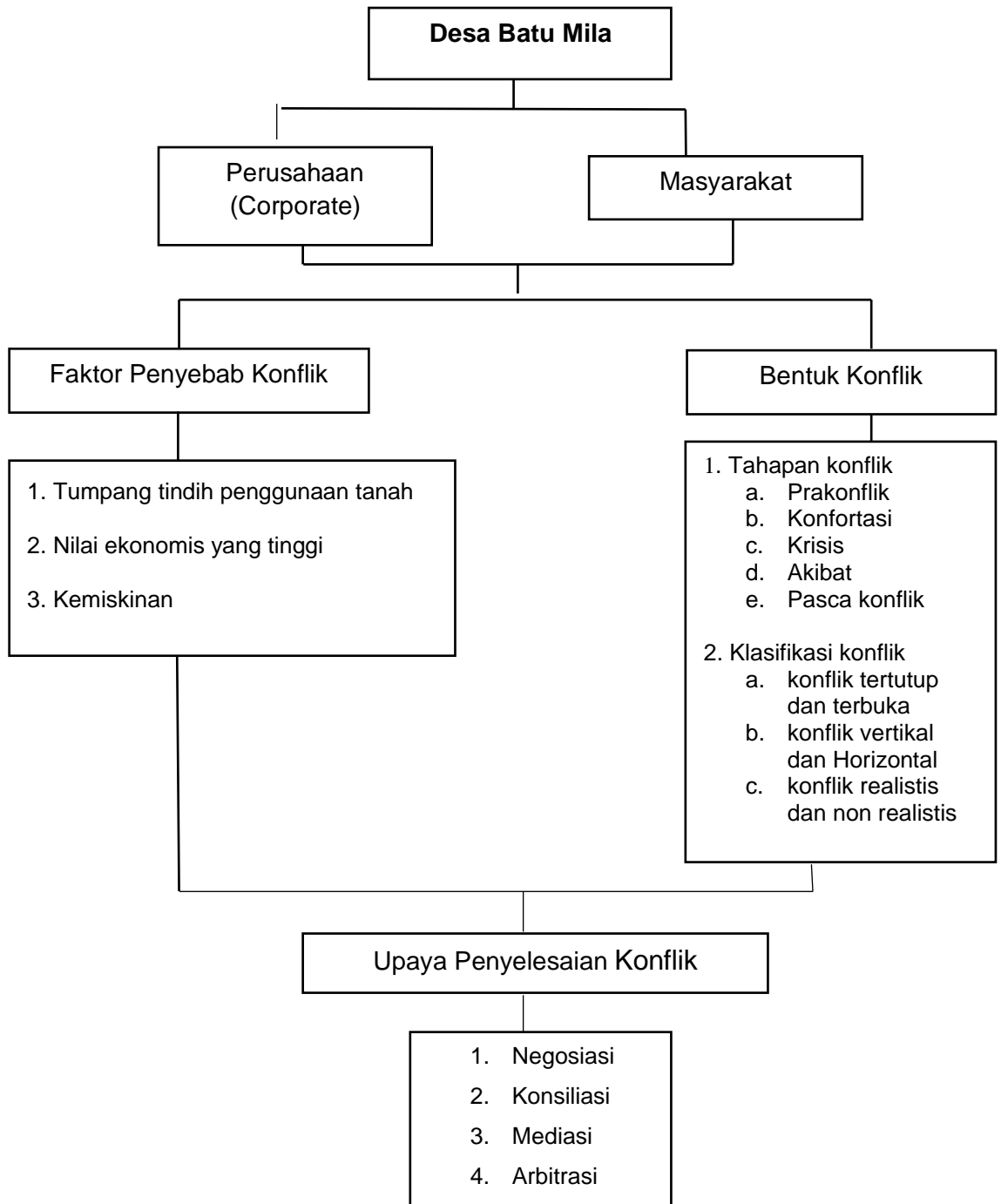
1.10 Kerangka Fikir

Desa Batu Mila, kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang terdapat PT. Perkebunan Nusantara XIV dan Masyarakat setempat. Masyarakat dan PT. Perkebunan Nusantara

sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja dikarenakan diantara keduanya saling mengklaim tanah atau lahan yang ada di Desa tersebut.

Kemudian dari permasalahan tersebut peneliti melakukan peninjauan literatur dalam melihat masalah yang terjadi. Ada beberapa konsep yang menjadi pembahasan nantinya diantaranya; akar timbulnya konflik atau faktor penyebab konflik, tahapan dan bentuk dari konflik itu sendiri, dan yang terakhir adalah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Lewis A. Coser Teori konflik Lewis A. Coser membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Konflik tidak realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar-kepercayaan lainnya. Adapun alasan menggunakan teori ini karena melihat objek dari penelitian yang berhubungan dengan kasus konflik yang berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah atau lahan. Seperti yang dijelaskan Lewis A. Coser bahwa konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan yang terjadi dalam hubungan yang ditujukan pada suatu objek yang dianggap mengecewakan dalam artian konflik yang bersumber nyata atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah.



Skema Kerangka Pikir

1.11 Defenisi Operasional

- a) Konflik merupakan kondisi dimana individu-individu atau kelompok-kelompok yang sedang dalam situasi atau proses pertentangan, atau perbedaan pendapat dan tidak berfungsinya norma sosial dan hukum.
- b) Konflik sengketa lahan adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang bertujuan untuk menguasai suatu lahan atau tanah.
- c) Tumpang tindih penggunaan tanah merupakan faktor yang terjadi akibat dari kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya.
- d) Kemiskinan merupakan salah satu masalah kompleks yang berkaitan antara tingkat pendapatan, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya.
- e) Bentuk konflik adalah gambaran proses terjadinya konflik yang bertujuan untuk memberi informasi terkait dengan konflik yang sedang berlangsung.
- f) Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain.
- g) Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
- h) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- i) Arbitrasi adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berkonflik yang bertujuan menyelesaikan masalah di luar pengadilan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Adapun pendekatan dan strategi penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya (Chairunnissa, 2017). Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

Tujuan penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penelitian model kualitatif, baik dalam hal Bahasa maupun fokusnya. Penelitian kuantitatif bertujuan meliputi variabel-variabel dalam penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian (Creswell, 2019). Metode-metode dalam penelitian kuantitatif pada umumnya melibatkan proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian.

Metode penelitian kuantitatif memiliki strategi penelitian yang beragam seperti eksperimen, penelitian survei, analisis isi, dan analisis data sekunder. Penelitian ini sendiri menggunakan strategi penelitian survei. Penelitian metode ini menggunakan kuesioner atau angket sebagai sumber data utama. Dalam penelitian survei, responden diminta untuk memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis di dalam kuesioner atau angket. Kemudian jawaban dari seluruh responden diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif tertentu (Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, 2019).

2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Rencana waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan dimulai pada pertengahan bulan Agustus 2023-Oktober 2023 dengan pertimbangan kesiapan instrumen penelitian, proses pengumpulan data, proses pengolahan data, hingga proses validasi data.

Lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah salah satu daerah yang menjadi pusat aktivitas PT. Perkebunan Nusantara XIV dan menjadi akses keluar masuknya Perusahaan. Lokasi ini juga sampai saat ini masih menolak keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XIV.

2.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) dalam (Febrianty, 2018) populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi dalam wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, jumlah keseluruhan populasi yang ada di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang ialah 1.710 di tahun 2019. Yang kemudian jumlah Kartu Keluarganya sekitar 340 Kartu Keluarga di tahun 2019 (Enrekang, 2020). Adapun jumlah populasi berdasarkan jenis kelamin ialah, laki-laki berjumlah 836 dan jumlah perempuannya 874.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, 2019).

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling* (sampel acak sederhana) yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Sampel tersebut diambil menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan sebesar 10% atau 0,1. Rumus *slovin* sendiri dapat dituliskan sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Ket:

n: Ukuran sampel yang dicari

N: Ukuran Populasi

e: Toleransi Kesalahan 10% (10%=0,1).

Dalam penelitian diketahui bahwa

N: 340

n: 0,1 atau 10%

$$n = \frac{340}{1 + 340 \cdot 0.1^2}$$

$$n = \frac{340}{1 + 340 \cdot 0.01}$$

$$n = \frac{340}{4,4}$$

$$n = 77$$

Berdasarkan perhitungan rumus *slovin* tersebut maka bisa disimpulkan bahwa besar sampelnya sejumlah 77 responden dengan batas kesalahan sebesar 10%. Untuk 77 responden tersebut maka akan dilakukan pengacakan dari data warga yang telah didapatkan. Peneliti menentukan sampel dengan cara yaitu dengan memilih langsung responden menggunakan *website* pengacakan otomatis.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder: Menurut (Sayanto, 2005), berdasarkan derajat sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:

2.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), misalnya dari individu atau perorangan dan yang lainnya yang merupakan sumber utama data penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan langsung pada objek sasaran yaitu dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Kuesioner
Kuesioner yaitu suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan di teliti. Kuesioner memuat berbagai pertanyaan atau pernyataan yang akan ditanyakan kepada responden. Perbedaan kuesioner dengan wawancara adalah, pertanyaan dalam kuesioner lebih rinci dan jumlahnya relative lebih banyak (Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, 2019).
- b) Observasi
Teknik observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung

berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Dalam teknik observasi ini peneliti memakai tingkat observasi partisipasi, pada tahap ini peneliti aktif berpartisipasi pada aktifitas dalam konteks sosial yang telah diselidiki, dengan kata lain peneliti melibatkan diri dalam kehidupan sosial di daerah yang sedang diteliti.

2.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder ini bias berbentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, internet dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya.

2.5 Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan bantuan program *Statistic Product and Service Solution* (SPSS). Adapun prosesnya mencakup data *editing*, *data coding*, *data entering*, *data cleaning*, data output dan data *analyzing* (Martono, 2019).

- a) *Editing*
Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini penting dilakukan karena data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti seperti misalnya ada diantaranya yang kurang atau terlewatkan. Proses *editing* dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab kemudian memeriksa satu persatu lembar instrumen pengumpulan data serta memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia.
- b) *Data Coding*
Setelah tahap *editing* selesai, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasikan data-data tersebut. Melalui tahapan pengodean yang bermaksud data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis.
- c) *Data Entering*
Merupakan proses pemindahan data yang telah diubah dalam bentuk kode angka ke dalam komputer.
- d) *Data Cleaning*
Data cleaning merupakan proses pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke komputer sudah selesai dengan informasi yang sebenarnya.
- e) *Data Output*
Data output atau mengeluarkan data merupakan tahap menyajikan hasil pengolahan data dengan bentuk yang sudah dibaca dan lebih menarik.

f) *Data Analyzing*

Data analyzing atau menganalisis data mengharuskan peneliti menginterpretasikan data yang telah diperoleh selama melakukan pengumpulan data di lapangan dan adapun model analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Uji statistik deskriptif adalah uji statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

2.6 Teknik Penyajian Data

Data yang didapatkan kemudian disajikan dalam berbagai bentuk dan narasi sesuai dengan tujuan dari penelitian. Adapun teknik penyajian data dalam penelitian ini adalah tabel distribusi frekuensi dan pie chart (Martono, 2019)

1. Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi merupakan tabel yang digunakan untuk menampilkan persebaran data dalam suatu distribusi. Penyusunan tabel distribusi frekuensi bermanfaat untuk memudahkan kita dalam penyajian data sehingga mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi.

2. *Pie Chart*

Pie chart merupakan sebuah diagram yang berbentuk lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa bagian atau daerah yang menunjukkan persentase masing-masing kelas.